

**FORMULIR PENERIMAAN ARTIKEL JURNAL ILMIAH TERPADU
UNIVERSITAS BINA DARMA**

Nama Penulis : Verawaty, SE, M.Sc., Ak. & Citra Indah Merina, SE, Ak., MM.
 Institusi : Universitas Bina Darma (Program Studi Akuntansi)
 Judul Artikel : Analisis Komparasi Indeks *Internet Financial Reporting* Pemerintah Daerah Di Indonesia

Tipe Artikel : Field Research Library Research

Nama Jurnal : Matrik MBiA TEKNO
 Bina Edukasi Bina Bahasa INOVASI PSYCE

Daftar Kelengkapan Artikel :	ada	tidak	Keterangan
Hardcopy 2 rangkap & Softcopy (file.doc)	✓		
Biodata penulis			
Judul (Indonesia max 14 kata & Inggris 10 kata)	✓		
Abstrak : Indonesia dan Inggris (100-150 kata)	✓		
Keywords	✓		
Pendahuluan	✓		
Metodologi Penelitian (Field Research)	✓		
Pembahasan	✓		
Kesimpulan	✓		
Daftar Rujukan (T-5)	✓		
Lampiran (optional)			

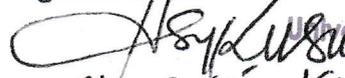
Catatan : Keaslian materi artikel bukan tanggung jawab tim penyunting.

Waktu Proses

Deskripsi	Waktu	Keterangan
Penyerahan artikel	12/11/2013	
Pengeditan format artikel oleh pengelola (selesai)		
Pengeditan format artikel oleh penulis (selesai)		
Pembagian artikel oleh Ketua Penyunting		
Pengeditan isi (content) artikel oleh Penyunting (Editor)		
Pengeditan isi (content) artikel oleh Penulis (jika ada)		

Palembang, 12/11/ 2013

Yang Menerima
 Pengelola Jurnal Ilmiah Terpadu


 Ch. Desi Kusumandari
 Universitas Bina Darma
 Jurnal Ilmiah Terpadu
 (JIT - UBD)

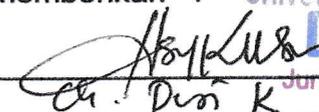
Penulis,


 VERAWATY, SE, M.Sc., Ak.

Voucher Rp. 100.000 (...Seratus Ribu..... rupiah)

Diberikan kepada : verawaty.

Tanggal pemberian : 12/11/2013

Yang memberikan : Universitas Bina Darma

 Ch. Desi Kusumandari
 Universitas Bina Darma
 Jurnal Ilmiah Terpadu
 (JIT - UBD)

ANALISIS KOMPARASI INDEKS *INTERNET FINANCIAL REPORTING* PEMERINTAH DAERAH DI INDONESIA

Verawaty, SE, M.Sc., Ak, CA.¹, Citra Indah Merina, SE, Ak., MM.²
Dosen Universitas Bina Darma, Palembang
Jalan Jenderal Ahmad Yani No.12, Palembang
verawaty_mahyudin@yahoo.com¹, citra_ims@yahoo.com²

Abstract: The purpose of the study is aimed to compare the quality of financial reporting disclosures or IFR (Internet Financial Reporting) of provincial and municipal (city) governments in Indonesia by using a disclosure index developed by Cheng et al. (2000). The discussion of the study analyzes the optimization of the accounting reporting based on four components; content, timeliness, technology, and user support between the two groups of samples. The provincial government is more highlighted by the public so it is hypothesized that it will disclose information in its e-government with the better format and quality than the city government. Based on the results of testing with the Mann Whitney Test, all the components are not significant. That is, the results of this study indicate that there is no difference between the quality of financial reporting disclosures or IFR (Internet Financial Reporting) between provincial and city governments in Indonesia by using a disclosure index.

Keywords: *e-government, Internet Financial Reporting, accessibility index value, content, timeliness, technology, user support*

Abstrak: Tujuan dalam penelitian ini untuk membandingkan kualitas pengungkapan pelaporan keuangan atau IFR (Internet Financial Reporting) antara pemerintah provinsi dan pemerintah kota di Indonesia dengan menggunakan indeks pengungkapan yang dikembangkan oleh Cheng et al. (2000). Pembahasan penelitian mengupas tentang optimalisasi pelaporan akuntansi dengan empat komponen *content, timeliness, technology* dan *user support* antar kedua kelompok sampel. Pemerintah provinsi tentunya lebih disorot oleh masyarakat sehingga dihipotesiskan akan mengungkap informasi yang dimilikinya dengan format dan kualitas yang lebih baik dibandingkan dengan pemerintah kota. Berdasarkan hasil pengujian dengan *Mann Whitney Test*, semua komponen tidak signifikan. Artinya, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan antara kualitas pengungkapan pelaporan keuangan atau IFR (*Internet Financial Reporting*) antara pemerintah provinsi dan pemerintah kota di Indonesia.

Kata Kunci: *e-government, Internet Financial Reporting (IFR), accessibility index value, content, timeliness, technology, user support*

1. PENDAHULUAN

Penggunaan teknologi yang mempermudah masyarakat untuk mengakses informasi dapat mengurangi korupsi dengan cara meningkatkan transparansi dan akuntabilitas lembaga publik. Selain itu, sekaligus dapat memperluas partisipasi publik karena masyarakat dimungkinkan untuk terlibat aktif, baik dalam pengambilan keputusan maupun kebijakan oleh pemerintah, perbaikan

produktifitas, dan efisiensi birokrasi serta peningkatan pertumbuhan ekonomi.

Teknologi yang dimaksud adalah internet yang merupakan teknologi informasi yang banyak menjanjikan kemudahan dan fasilitas. Melalui media ini, dapat diperoleh berbagai macam informasi yang dibutuhkan. Keunggulan yang fundamental adalah tidak mengenal batas waktu dan wilayah. Selain itu, media informasi dan komunikasi ini dibandingkan dengan media

lain, yaitu informasi yang didapatkan lebih murah, cepat, dan mudah dengan jangkauan global.

Tren penggunaan internet sebagai media pengungkapan informasi juga berdampak pada sektor pemerintah. Pemerintah sangat menyadari hal ini karena itu pemerintah menempuh berbagai upaya antara lain dengan menerapkan sistem *elektronik government (e-government)* atau pemerintahan berbasis elektronik (Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2001 dan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003). Sistem ini dimaksudkan untuk mendukung pemerintahan yang baik (*good governance*). Dengan pola ini, pemerintahan tradisional (*traditional government*) yang identik dengan *paper-based administration* ataupun pengerjaan secara manual mulai ditinggalkan.

E-government saat ini dimiliki hampir semua pemerintah daerah. Ditambah lagi dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Undang-undang ini secara eksplisit menyatakan bahwa masyarakat (pemohon informasi publik) berhak mendapatkan akses informasi (informasi publik) dari penyelenggara pemerintahan (badan publik). Melalui *e-government*, informasi publik bisa disampaikan oleh badan publik dengan lebih ekonomis, efektif, dan efisien.

Jika dikaitkan dengan sistem informasi, tuntutan akan ketersediaan dan aksesibilitas pelaporan keuangan di sektor publik tentunya akan lebih optimal jika dilakukan dengan perencanaan informasi strategis yang merupakan kompetensi teknologi informasi yang dikembangkan dari waktu ke waktu oleh bagian *Government Chief Information Officer (GCIO)*.

Semakin lengkap komponen informasi (aspek *content*), semakin tercukupi kebutuhan akan informasi publik. Semakin tepat waktu laporan dipublikasikan, semakin handal informasi yang digunakan (aspek *timeliness*). Semakin variatif pemanfaatan teknologi, semakin aplikatif bagi *stakeholder* (aspek *technology*). Semakin optimal fitur-fitur yang menunjang penggunaan *e-government*, semakin baik sarana komunikasi kepada publik (aspek *user support*). Tentunya semua hal tersebut tidak akan bisa dilakukan oleh bagian keuangan pemerintah daerah saja tanpa dukungan GCIO atau setaranya dalam pemerintah daerah tersebut.

Pemerintah sebagai badan yang melakukan investasi pada teknologi informasi berupa *e-government* ini menyadari pentingnya untuk berupaya memuaskan kebutuhan akan informasi publik. Hal ini tentu saja menimbulkan pertanyaan bagi *stakeholder* publik apakah *e-government* yang dimiliki telah dimaksimalkan pemanfaatannya secara baik, sehingga tidak hanya pada tataran bahwa pemerintah daerah tersebut telah memiliki *e-government* saja, tetapi sampai pada optimalisasi pemanfaatannya termasuk dalam aspek akuntansinya. Fokus penelitian ini adalah pengungkapan keuangan sektor publik melalui media internet atau yang disebut sebagai IFR (*Internet Financial Reporting*).

Pembahasan penelitian akan dikupas tentang optimalisasi pelaporan akuntansi dengan berfokus pada keunggulan diseminasi informasi laporan keuangan dengan pendekatan media internet, antara lain dapat didistribusikan lebih cepat (aspek *timeliness*) dan dapat dieksploitasi untuk lebih membuka diri dengan

menginformasikan laporan keuangannya (aspek *disclosure*). Dengan kata lain kualitas pengungkapan pelaporan keuangan di sektor publik akan lebih optimal jika pelaporan keuangan menggunakan IFR (*Internet Financial Reporting*).

Berdasarkan pernyataan diatas, penelitian ini berusaha membandingkan kualitas pengungkapan pelaporan keuangan atau IFR (*Internet Financial Reporting*) pemerintah provinsi dan pemerintah kota di Indonesia dengan menggunakan indeks pengungkapan yang dikembangkan oleh Cheng et al. (2000). Alasan pemilihan kelompok sampel karena pemerintah provinsi tentunya lebih disorot oleh masyarakat sehingga dihipotesiskan akan mengungkapkan informasi yang dimilikinya dengan format dan kualitas yang lebih baik dibandingkan dengan pemerintah kota.

Literatur-literatur IFR yang ada mengindikasikan bahwa bahwa sama seperti sektor privat, sektor publik juga menggunakan internet sebagai mekanisme untuk menyebarkan laporan dan pengungkapan yang disediakan bagi *stakeholder* publik. Hal ini mendukung pernyataan Wagenhofer (2003) bahwa IFR tidak mungkin melepaskan diri dari pengungkapan akuntansi sektor publik.

Penelitian-penelitian terdahulu menjadi landasan dalam merumuskan hipotesis penelitian. Terdapat beberapa penelitian dari luar negeri yang membahas mengenai ketersediaan laporan keuangan melalui media internet atau IFR pada sektor publik, yaitu Groff dan Pittman (2004) meneliti mengenai praktek IFR pada 100 pemerintah daerah terbesar di USA. Laswad et al (2005) menguji IFR secara sukarela pada

pemerintah daerah di New Zealand. Kemudian Styles dan Tennyson (2007) meneliti *accessibility* pelaporan keuangan semua pemerintah daerah USA di internet. Adapun penelitian dari Indonesia yaitu penelitian Verawaty dan Abdul Halim (2009) meneliti ketersediaan IFR pada tingkat pemerintah provinsi di Indonesia, Verawaty (2010) meneliti ketersediaan IFR pada pemerintah daerah di Sumatera Selatan, dan Verawaty dan Merina (2011) meneliti aksesibilitas IFR pemerintah provinsi di Indonesia dengan mengaitkannya dengan penerapan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).

Penelitian terakhir, Verawaty dan Merina (2011) hanya mengungkapkan mengenai aksebilitas *content* (isi), yaitu berapa langkah yang diperlukan untuk menemukan laporan keuangan dalam *e-government*. Adapun mengenai aspek *timeliness* (ketepatanwaktuan), *technology* (pemanfaatan teknologi), dan *user support* (dukungan bagi pengguna) tidak dibahas. Penelitian ini akan lebih jauh membahas kualitas pengungkapannya yang dilakukan oleh pemerintah daerah dengan menggunakan indeks Cheng et al. (2000).

Isu penelitian mengenai kualitas pengungkapan pelaporan keuangan atau IFR pada sektor pemerintah belum pernah diangkat di Indonesia. Akan tetapi penelitian yang sama pada sektor privat sudah dilakukan, yaitu Almilia (2009) dan Mannan (2009). Hal ini terjadi karena penggunaan teknologi informasi pada sektor pemerintah yang ditandai dengan penggunaan *e-government* baru marak lima tahun terakhir ini saja.

Adapun tujuan dalam penelitian ini untuk membandingkan kualitas pengungkapan pelaporan keuangan atau IFR (*Internet Financial Reporting*) pemerintah provinsi dan pemerintah kota di Indonesia dengan menggunakan indeks pengungkapan yang dikembangkan oleh Cheng et al. (2000).

Manfaat yang dapat diperoleh dari hasil penelitian ini, yaitu bagi pemerintah daerah sebagai bahan pertimbangan dalam upaya meningkatkan penerapan *e-government* dalam bidang akuntansi, yaitu IFR (*Internet Financial Reporting*) untuk memenuhi kewajibannya sebagai penyedia informasi publik, sedangkan bagi akademisi dan peneliti selanjutnya sebagai bahan masukan atau referensi tambahan jika ingin mengembangkan penelitian yang berhubungan penerapan IFR (*Internet Financial Reporting*) melalui *e-government*.

2. METODA PENELITIAN

1. Desain Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan berdasarkan pada *hypothetico-deductive method*. Menurut Sekaran (2006), penelitian dengan menggunakan metoda ini melibatkan tujuh tahap, yaitu *observation* (observasi), *preliminary information gathering* (pengumpulan data awal), *theory formulation* (perumusan teori), *hypothesis* (perumusan hipotesis), *further scientific data collection* (pengumpulan data saintifik selanjutnya), *data analysis* (analisis data), dan *deduction* (deduksi).

2. Populasi dan Sampel

Populasi penelitian adalah semua pemerintah daerah di Indonesia, sedangkan

sampel penelitian dibagi menjadi dua. Kelompok pertama adalah semua pemerintah provinsi tingkat provinsi di Indonesia. Alasannya adalah pemerintah provinsi tentunya lebih disorot oleh masyarakat sehingga dihipotesiskan akan mengungkapkan informasi yang dimilikinya dengan format dan kualitas yang lebih baik dibandingkan dengan pemerintah kota.

Adapun kelompok kedua ditentukan berdasarkan kriteria tertentu atau *purposive sampling method*. Kriteria khusus tersebut adalah di setiap provinsi akan dipilih satu pemerintah kota yang merupakan daerah kategori paling luas, paling banyak penduduk, dan paling tinggi pendapatan per kapitanya. Hal ini berdasarkan penelitian Mussari dan Steccolini (2006) bahwa sampel yang bukan merupakan pemerintah dengan kota-kota yang besar dianggap tidak mendapat tuntutan tinggi tentang pengungkapan informasi laporan keuangannya. Selain itu kriteria umum untuk setiap kelompok sampel adalah memiliki *e-government* sampai dengan September 2013 dan *e-government* tersebut tidak dalam perbaikan (*maintenance*).

Data dikumpulkan melalui observasi dengan media internet terhadap ketersediaan *e-government* pada dua kelompok sampel yang akan dianalisis secara komparatif. Terakhir untuk melengkapi analisis atas data yang telah dikumpulkan, peneliti melakukan wawancara dengan praktisi-praktisi pemerintah daerah yang berwenang terkait dengan kebijakan IFR di daerahnya. Hal ini diperlukan karena penelitian ini tentunya akan bersifat eksploratif karena belum pernah ada penelitian yang sama dilakukan di Indonesia sebelumnya sehingga dukungan hasil wawancara terhadap beberapa

praktisi pemerintah daerah akan memberikan *robustness aspect* terhadap hasil penelitian. Selain itu, tentunya data sekunder lainnya adalah berbagai sumber yang menjadi tinjauan pustaka dalam membangun hipotesis dan sekaligus mengujinya, antara lain buku-buku teks, artikel-artikel ilmiah ataupun populer, koran, serta internet.

3. Variabel Penelitian

Adapun berdasarkan Cheng et al. (2000), variabel-variabel yang digunakan untuk menilai kualitas pelaporan keuangan atau IFR (*Internet Financial Reporting*) dalam hipotesis ini adalah *content* (isi), *timeliness* (ketepatanwaktuan), *technology* (pemanfaatan teknologi), dan *user support* (dukungan bagi pengguna). Berikut penjelasan mengenai masing-masing variabel penelitian:

1. Content, yaitu meliputi komponen informasi keuangan seperti laporan neraca, rugi laba, arus kas, perubahan posisi keuangan serta laporan keberlanjutan seperti *footnotes*, *partial sets of financial statements* dan/atau *financial highlights* yang meliputi *summary financial statements* dan inti dari *financial statements* tersebut yang dipublikasikan melalui *e-government*. Informasi keuangan yang diungkapkan dalam bentuk html memiliki skor yang tinggi dibandingkan dalam format pdf, karena informasi dalam bentuk html lebih memudahkan pengguna informasi untuk mengakses informasi keuangan tersebut menjadi lebih cepat.

2. Timeliness atau ketepatanwaktuan, yaitu informasi yang siap digunakan para pemakai sebelum kehilangan makna dan kapasitas dalam

pengambilan keputusan. Ketika *e-government* dapat menyajikan informasi yang tepat waktu, maka semakin tinggi indeksinya.

3. Technology atau pemanfaatan teknologi, yaitu komponen ini terkait dengan pemanfaatan teknologi yang ada dalam *e-government* yang tidak dapat disediakan oleh media laporan cetak serta penggunaan media teknologi multimedia, *analysis tools* (contohnya, *Excel's Pivot Table*), fitur-fitur lanjutan (seperti implementasi *Intelligent Agent* atau XBRL). Semakin banyak fitur, semakin tinggi indeksinya.

4. User Support atau dukungan bagi pengguna, yaitu komponen ini terkait dengan fasilitas yang mempermudah pengguna untuk menemukan laporan keuangan di dalam *e-government*. Indeks *e-government* daerah semakin tinggi jika pemerintah daerah mengimplementasikan secara optimal semua sarana dalam *website* seperti media pencarian dan navigasi/*search and navigation tools* (seperti FAQ, *links to homepage*, *site map*, *site search*).

Adapun untuk menilai keempat komponen tersebut, berikut Indeks Aksesibilitas (Style dan Tennyson, 2007):

A : *Financial Highlights*, yaitu menyajikan *summary financial statements* dalam bentuk tabel ringkas atau uraian ringkas dan mudah diakses

B: *Financial Statement*, yaitu menyajikan komponen Laporan Keuangan yang lengkap dan komprehensif

C : *Html Format*, yaitu bentuk html memiliki skor yang tinggi dibandingkan dalam format pdf karena informasi lebih mudah dan cepat diakses

D : *Data for Prior Years*, yaitu IFR juga menyajikan laporan tahun sebelumnya sebagai pembandingan

E : *Up Date*, yaitu IFR untuk tahun berjalan (misal disajikan per semester biar selalu *update* dan tepat waktu)

F : *Analysis Tools*, yaitu menyediakan *analysis tools* (contohnya, *Excel's Pivot Table*)

G : Fitur Lanjutan, yaitu menyediakan fitur-fitur lanjutan (seperti implementasi *Intelligent Agent* atau XBRL)

H : *Site Search*, yaitu *search engine* di dalam situsnya bisa digunakan untuk mencari LK

I : *Link Page*, yaitu menyediakan link ke IFR di dalam situsnya

J : *FAQ or Contact*, yaitu menyediakan fasilitas tanya jawab atau *email/phone* pengelola

Keterangan:

- Total indeks adalah 10 poin. *Content* memiliki maksimal 3 poin (A-C), *timeliness* adalah maksimal 2 poin (D-E), *technology* 2 poin (F-G), dan *user support* adalah 3 poin (H-J).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hasil Penelitian

Penelitian ini menggunakan pengujian statistik *Mann Whitney Test* untuk membandingkan komponen *content*, *timeliness*, *technology* dan *user support* antar kedua kelompok sampel yaitu pemerintah provinsi dan pemerintah kota.

Tabel 1 Hasil Survei (Observasi) terhadap *e-Government* Pemerintah Provinsi
(Lampiran 1)

Tabel 2 Hasil Survei (Observasi) terhadap *e-Government* Pemerintah Kota

(Lampiran 2)

Tabel 3 Pengujian *Mann Whitney Test*

Tabel 3a. (Lampiran 3a) Ranks

Tabel 3b. (Lampiran 3b) Test Statistics

2. Pembahasan

Berdasarkan Tabel 1 yang merupakan hasil survei (observasi) terhadap *e-government* pemerintah provinsi, komponen paling tinggi adalah *user support*. Dalam komponen ini dinilai apakah di dalam *e-government* memiliki fitur *Site Search* (*search engine* di dalam situsnya bisa digunakan untuk mencari laporan keuangan), *Link Page* (menyediakan link ke IFR di dalam situsnya), dan *FAQ or Contact* (menyediakan fasilitas tanya jawab atau *email/phone* pengelola). Fitur terakhir paling banyak disediakan di dalam *e-government*.

Berdasarkan poin aksesibilitas, komponen kedua dan ketiga adalah *timeliness* dan *technology*. Namun yang paling menarik adalah tidak tersediakan fitur *technology* di semua *e-government* pemerintah provinsi. Penilaian untuk komponen ini adalah berdasarkan *Analysis Tools*, yaitu menyediakan *analysis tools* (contohnya, *Excel's Pivot Table*) dan Fitur Lanjutan (menyediakan fitur-fitur lanjutan, yaitu seperti implementasi *Intelligent Agent* atau XBRL).

Jika dilihat per provinsi, DKI Jakarta merupakan provinsi yang paling unggul. Dari 10 poin, DKI Jakarta meraih 7 poin. Kemudian disusul oleh provinsi DIY, Gorontalo, dan Kalimantan Tengah dengan nilai masing-masing 5 poin. Adapun provinsi mana yang paling rendah nilai poinnya, yaitu 1 poin, ternyata sangat dominan, yaitu 40% dari total keseluruhan sampel penelitian.

Berdasarkan Tabel 2, hanya 78,79% *e-government* pemerintah kota dalam status *online*, sisanya 9,09% *e-government* yang dimiliki dalam status error (kemungkinan dalam status *under maintenance*), dan 12,12% pemerintah kota bahkan belum memiliki *e-government*. Jadi hanya ada 26 pemerintah kota yang sesuai dengan kriteria sampel yang telah ditetapkan sebelumnya.

Jika dikaitkan kualitas pengungkapan berdasarkan penelitian Cheng et al (2000), hasilnya sama seperti pada kelompok sampel pemerintah provinsi, yaitu komponen yang paling tinggi adalah *user support*. Komponen ini menilai apakah di dalam *e-government* memiliki fitur *Site Search (search engine)* di dalam situsnya bisa digunakan untuk mencari laporan keuangan), *Link Page* (menyediakan link ke IFR di dalam situsnya), dan *FAQ or Contact* (menyediakan fasilitas tanya jawab atau email/phone pengelola). Fitur terakhir juga yang paling banyak disediakan di dalam *e-government*.

Berdasarkan poin aksesibilitas, komponen kedua dan ketiga adalah *timeliness* dan *technology*. Namun yang paling menarik adalah juga tidak tersediakan fitur *technology* di semua *e-government* pemerintah kota. Penilaian untuk komponen ini adalah berdasarkan *Analysis Tools*, yaitu menyediakan *analysis tools* (contohnya, *Excel's Pivot Table*) dan Fitur Lanjutan (menyediakan fitur-fitur lanjutan, yaitu seperti implementasi *Intelligent Agent* atau XBRL. Adapun untuk komponen *timeliness*, hanya tujuh pemerintah kota yang mengoptimalkannya, yaitu Yogyakarta, Jakarta, Bandung, Surabaya, Ambon, Banda Aceh, dan Kendari. Hal ini berarti 21,2 % dari kelompok sampel pemerintah

kota.

Jika dilihat per kota, Jakarta merupakan kota yang paling unggul. Dari 10 poin, DKI Jakarta meraih 7 poin. Kemudian disusul oleh kota Surabaya dan Ambon dengan nilai masing-masing 5 poin. Adapun provinsi mana yang paling rendah nilai poinnya, yaitu 1 poin, ternyata sangat dominan, yaitu 39,4 % dari total keseluruhan kelompok sampel penelitian ini.

Berikutnya merupakan pengujian secara statistik. Karena penelitian ini membandingkan dua kelompok sampel dari populasi yang sama, sehingga jumlahnya pun harus sama. Berdasarkan Bab 4, kriteria umum untuk setiap kelompok sampel adalah memiliki *e-government* sampai dengan September 2013 dan *e-government* tersebut tidak dalam perbaikan (*maintenance*). Jadi yang lolos untuk uji tes, untuk pemerintah provinsi kecuali Bengkulu, Maluku Utara, dan Sumatera Selatan, sedangkan pemerintah kota kecuali Palangkaraya, Pangkal Pinang, Tanjung Pinang, Sofifi, Manokwari, Pekanbaru, dan Makasar.

Dari output **Rank** (Tabel 3a), dapat kita lihat bahwa nilai mean untuk pemerintah provinsi lebih besar daripada nilai pemerintah kota (**29,13 > 27,77**). Dari pengujian **Mann Whitney Test**, yaitu output "**Test Statistic^a**", nilai statistik uji Z yang kecil yaitu **-0,393** dan nilai **sig.2-tailed adalah 0,694 > 0,05**. Hal ini berarti hasil uji tidak signifikan secara statistik. Dengan demikian tidak ada perbedaan pengungkapan informasi pada *e-government* yang dimilikinya antara pemerintah provinsi dengan format dan kualitas yang lebih baik dibandingkan dengan pemerintah kota untuk komponen *content*.

Dari output **Rank** (Tabel 3a), dapat kita lihat bahwa nilai mean untuk pemerintah provinsi sedikit lebih besar daripada nilai pemerintah kota (**28,75 > 28,21**). Dari pengujian *Mann Whitney Test*, yaitu output “**Test Statistic^a**”, nilai statistik uji Z yang kecil yaitu **-0,157** dan nilai **sig.2-tailed adalah 0,875 > 0,05**. Hal ini berarti hasil uji tidak signifikan secara statistik. Dengan demikian tidak ada perbedaan pengungkapan informasi pada *e-government* yang dimilikinya antara pemerintah provinsi dengan format dan kualitas yang lebih baik dibandingkan dengan pemerintah kota untuk komponen *timeliness*

Dari output **Rank**(Tabel 3a), dapat kita lihat bahwa nilai mean untuk pemerintah kota sedikit lebih besar daripada nilai pemerintah provinsi (**28,83 > 28,22**). Dari pengujian *Mann Whitney Test*, yaitu output “**Test Statistic^a**”, nilai statistik uji Z yang kecil yaitu **-0,155** dan nilai **sig.2-tailed adalah 0,877 > 0,05**. Hal ini berarti hasil uji tidak signifikan secara statistik. Dengan demikian tidak ada perbedaan pengungkapan informasi pada *e-government* yang dimilikinya antara pemerintah provinsi dengan format dan kualitas yang lebih baik dibandingkan dengan pemerintah kota untuk komponen *user support*.

Adapun pengujian untuk komponen *technology* tidak bisa dilakukan karena, baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kota sama sekali tidak mengoptimalkannya. Jadi nilainya nol atau tingkat signifikansinya adalah 1.

Berdasarkan Tabel 3b, semua komponen tidak signifikan. Artinya, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan antara kualitas pengungkapan pelaporan

keuangan atau IFR (*Internet Financial Reporting*) pemerintah provinsi dan pemerintah kota di Indonesia dengan menggunakan indeks pengungkapan yang dikembangkan oleh Cheng et al. (2000).

Dukungan atas fenomena diatas belum bisa dijelaskan secara empiris karena penelitian ini merupakan penelitian eksploratif. Namun secara normatif, berdasarkan sisi regulasi, *e-government* telah diperkenalkan itu dalam Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2001 dan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 yang kemudian disusul oleh regulasi-regulasi berikutnya yang relevan tentang penggunaan teknologi informasi di pemerintahan. Namun, tentang bagaimana standardisasi *content*-nya belum bersifat *mandatory*.

Berdasarkan wawancara dengan beberapa praktisi pemerintah, komponen *timeliness*, yaitu tentang apakah *e-government* juga menyajikan IFR untuk laporan tahun sebelumnya sebagai pembandingan dan IFR untuk tahun berjalan (misal disajikan per semester biar selalu update dan tepat waktu), dianggap tidak perlu dilakukan karena ada badan publik lain, yaitu yang lebih berkompeten melakukannya, yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai badan yang melakukan penilaian atas laporan keuangan pemerintah. *Website* BPK dianggap yang paling tepat melakukan transparansi atas LK pemerintah. Walaupun dalam ada instruksi dari Menteri Dalam Negeri No. 188.52/1797/DJ tentang Peningkatan Transparansi Pengelolaan Anggaran yang salah satu isinya adalah menyiapkan menu konten “Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah” dalam *website* resmi pemerintah provinsi. Hasil observasi melalui penelitian ini

mengindikasikan pemerintah provinsi belum bisa menerapkannya.

Adapun jika menyangkut *technology* dan *user support*, menurut Verawaty dan Halim (2009), *e-government* merupakan sebuah bidang yang baru. Pemerintah umumnya jarang yang memiliki SDM yang handal di bidang teknologi informasi. SDM yang handal ini biasanya ada di lingkungan bisnis/industri, belum banyak di sektor publik. Kekurangan SDM ini menjadi salah satu penghambat implementasi dari *e-government*, terutama tentang *Analysis Tools* dan fitur-fitur lanjutan. Menurut Sosiawan (2008), untuk mengatasi hambatan langkanya SDM yang handal, maka perlu dilakukan pendidikan dan pelatihan SDM di bidang teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi. Secara pragmatis, hendaknya pelatihan tersebut bersifat *inhouse* di tingkat penyelenggara pemerintah daerah agar diperoleh pemahaman dan *literacy* yang menyeluruh di kalangan pegawai pemerintah daerah. *Inhouse training* tersebut dapat melibatkan para pakar di daerah maupun di lain daerah serta kerjasama dengan pihak perguruan tinggi yang ada. Sementara di tingkat pusat perlu diselenggarakan secara sentralisasi (oleh Depkominfo melalui Diklat terpadu) dan secara desentralisasi dengan membuat pusat-pusat diklat di lembaga pendidikan milik Depdagri atau lembaga pendidikan milik swasta yang bekerjasama dengan Depkominfo ataupun perguruan tinggi. Selain itu diklat ini dapat dilaksanakan sendiri oleh masing-masing pemerintah daerah yang lebih tahu kebutuhannya sendiri berkaitan dengan implementasi *e-government*.

Peningkatan SDM pegawai untuk implementasi *e-government* perlu penanganan yang serius dan dilakukan bersama oleh pemerintah, perguruan tinggi, dan pihak swasta. Yang paling penting dan utama untuk disampaikan dalam pelatihan tersebut adalah perlu diubah pandangan tentang keberhasilan pelaksanaan *e-government* bukan terletak pada teknologinya tetapi bergantung pada kemampuan manusia yang mengelolanya. Pada sisi manajerial perlu dibuat suatu model pengelolaan *e-government*, baik untuk tingkat pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pada struktur organisasi yang ada di departemen, kementerian dan lembaga pemerintah non-departemen perlu dipertegas bagian dari organisasi yang menangani *e-government* disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi dari struktur organisasi yang telah ada agar tidak terjadi kerancuan di dalam pengelolaan dan implementasi *e-government* di pemerintahan daerah.

Implikasi penelitian ini adalah pentingnya suatu lembaga yang mengatur dan menilai kualitas pengungkapan yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui *e-government*. Tentu saja ini juga akan berimplikasi pada perlunya dilakukan regulasi terhadap pengungkapan optimalisasi pemanfaatan *e-government*, baik bagi perusahaan provinsi, maupun pemerintah daerah kota dan kabupaten.

4. SIMPULAN DAN SARAN

1. Simpulan

Penelitian ini berusaha membandingkan kualitas pengungkapan pelaporan keuangan atau IFR (*Internet Financial Reporting*) pemerintah provinsi dan pemerintah kota di Indonesia

dengan menggunakan indeks pengungkapan yang dikembangkan oleh Cheng et al. (2000). Alasan pemilihan kelompok sampel karena pemerintah provinsi tentunya lebih disorot oleh masyarakat sehingga dihipotesiskan akan mengungkapkan informasi yang dimilikinya dengan format dan kualitas yang lebih baik dibandingkan dengan pemerintah kota.

Dengan hasil survei, yaitu 78,79% *e-government* pemerintah kota dalam status *online*, sisanya 9,09% *e-government* yang dimiliki dalam status error (kemungkinan dalam status *under maintenance*) dan 12,12% pemerintah kota bahkan belum memiliki *e-government*. Hasil survei juga menunjukkan adanya disparitas praktek pengungkapan informasi keuangan melalui *e-government* dan masih sedikitnya pemerintah daerah memanfaatkan penggunaan teknologi internet. Dari total 90,91% *e-government* pemerintah provinsi, hanya 56,67% yang melakukan *Internet Financial Reporting* (IFR). Adapun dari total hanya 78,79% *e-government* pemerintah kota, hanya 42,31% yang melakukan *Internet Financial Reporting* (IFR). Kualitas pengungkapan dilakukan oleh kedua kelompok sampel sangat bervariasi.

Berdasarkan hasil pengujian dengan *Mann Whitney Test*, semua komponen tidak signifikan. Artinya, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan antara kualitas pengungkapan pelaporan keuangan atau IFR (*Internet Financial Reporting*) pemerintah provinsi dan pemerintah kota di Indonesia dengan menggunakan indeks pengungkapan yang dikembangkan oleh Cheng et al (2000).

Adapun berdasarkan hasil wawancara, permasalahan di lapangan tentang kurangnya

optimalisasi terhadap penggunaan *e-government* untuk bidang akuntansi sektor publik (keuangan daerah) antara lain adalah mengenai regulasi-regulasi yang relevan tentang penggunaan teknologi informasi di pemerintahan, yaitu tentang bagaimana standardisasi *content* yang menyangkut akuntansi keuangan daerah yang masih belum bersifat *mandatory*. Pelimpahan kewajiban diseminasi kinerja keuangan pemerintah daerah untuk komponen *timeliness* adalah kepada pihak BPK. Hal ini setidaknya bisa diakomodir melalui optimalisasi *hiperlink* dari *e-government* pemerintah daerah tersebut ke *website* BPK jika tidak ingin didesiminasikan ke dalam *e-government* yang dimiliki.

Adapun jika menyangkut *technology* dan *user support*, untuk mengatasi hambatan langkanya SDM yang handal, maka perlu dilakukan pendidikan dan pelatihan SDM di bidang teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi karena keberhasilan pelaksanaan *e-government* bukan terletak pada teknologinya tetapi bergantung pada kemampuan manusia yang mengelolanya.

2. Saran

Implikasi penelitian ini adalah pentingnya suatu lembaga yang mengatur dan menilai kualitas pengungkapan yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui *e-government*. Tentu saja ini juga akan berimplikasi pada perlunya dilakukan regulasi terhadap pengungkapan optimalisasi pemanfaatan *e-government*, baik bagi perusahaan provinsi, maupun pemerintah daerah kota dan kabupaten.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Almilia, Luciana Spica, 2009. *Analisa Komparasi Indeks Internet Financial Reporting pada Website Perusahaan Go Publik di Indonesia*. Seminar Nasional Aplikasi Teknologi Informasi 2009.
- Almilia,, 2009. *Eksplorasi Pemanfaatan Technology dan User Support Pada Website Perusahaan Go Publik Di Indonesia*. Seminar Nasional Aplikasi Teknologi Informasi 2009.
- Cheng, A. Lawrence, S and Coy, D., 2000. *Measuring the Quality of Corporate Financial Websites: A New Zealand Study. Paper presented at the 12th Asian-Pacific Conference on International Accounting Issues – Beijing*.
- Giroux, G. and McLelland, A.J., 2003. *Governance Structure and Accounting at Large Municipalities. Journal of Accounting and Public Policy*.
- GASB (Governmental Accounting Standards Boards), 1999. *Concepts Statement No. 1: Objectives of Financial Reporting. Governmental Accounting Standards Boards Series Statement No. 34: Basic Financial Statement and Management Discussion and Analysis for State and Local Government*. Norwalk.
- Groff, JF, and Pitman, M.K., 2004. *Municipal Financial Reporting on the World Wide Web: A Survey of Financial Data Displayed on the Official Websites of the 100 largest US Municipalities. Journal of Government Financial Management*.
- Ingram, R.W., and Dejong, D.V., 1987. *The Effect of Regulation on Local Government Disclosure Practises. Journal of Accounting and Public Policy*, 6: 245-270.
- Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2001. *Telematika (Telekomunikasi, Media dan Informatika)*.
- Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003. *Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government*.
- Laswad, Fawzi, Fisher, Richard and Oyelere, Peter, 2005. *Determinants of Voluntary Internet Financial Reporting by Local Government Authorities. Journal of Accounting and Public Policy*.
- Mannan, Siti Sofiyah Abdul, 2009. *e-Corporate Governance Disclosure dan Kinerja Perusahaan pada Periode Bearish: Studi Kasus di Pasar Modal Indonesia*. Tesis UGM.
- Mussari, Riccardo and Steccolini, Ileana, 2006. *Using the Internet for Communicating Performance Information. Public Money and Management Journal*.
- Oyelere, Peter, Laswad, Fauzi, and Fisher, Richard, 2003. *Determinant of Internet Financial Reporting by New Zealand Companies. Journal of International Financial Management and Accounting*.
- Robbins, W.A. and Austin, K.R., 1986. *Disclosure Quality in Governmental Financial Report: An Assessment of the Appropriateness of A Compound Measure. Journal of Accounting Research*.
- Sekaran, Uma, 2006. *Metodologi Penelitian untuk Bisnis*. Penebit Salemba Empat.
- Sosiawan, Edwi Arief, 2008. *Tantangan dan Hambatan dalam Implementasi E-Government di Indonesia*. <http://edwi.dosen.upnyk.ac.id>.
- Styles, Alan K. and Tennyson, Mack, 2007. *The Accessibility of Financial Reporting of US Municipalities on the Internet. Journal of Public Budgeting, Accounting and Financial Management*. Spring.
- Supangkat, Suhono Harso, 2008. *CIO. Chief Information Officer. Peran Kepemimpinan Pengelola Informasi untuk Pertumbuhan Organisasi*. Penerbit ICT (The Indonesian ICT Institutes).
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. *Keterbukaan Informasi Publik*.
- Verawaty dan Halim, Abdul, 2009. *The Availability of IFR (Internet Financial Reporting) through E-Government as Public Transparency, Participation, and Accountability Means In Indonesia*. Master Thesis of UGM.
- Verawaty, 2010. *Ketersediaan IFR (Internet Financial Reporting) melalui e-government sebagai Sarana Transparansi, Partisipasi, dan Akuntabilitas Publik di Sumatera Selatan*. Penelitian DIPA Dikti Tahun 2010.

- Verawaty dan Merina, Citra Indah, 2011. *Aksesibilitas Informasi Publik Pemerintah Provinsi di Indonesia (Telaah Penerapan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Keterbukaan Informasi Publik)*. Penelitian DIPA Dikti Tahun 2011.
- Wagenhofer, A., 2003. *Economic Consequences of Internet Financial Reporting*. *Schmalenbach Business Review*, 55 (4): 262-279.
- Zimmerman, J., 1977. *The Municipal Accounting Maze: An Analysis of Political Incentives*. *Journal of Accounting Research*, 15: 107-144.

LAMPIRAN 1

No	MARESI	Sels	RUMAHSISWA										Jl									
			Grt		Tn		Tdn		Ls		Spnt											
			A	B	C	D	E	F	G	H		I		J								
1	Bli	olire											1	1	1	0	ifr					
2	Bten	olire												1	1	1	0	ifr				
3	Bglu	oflire																0	ste			
4	DadstinevaNgdata	olire	1	1		1							1	1	1	5	fr					
5	DadKusulokaddata	olire	1	1	1	1							1	1	1	7	fr					
6	Gotob	olire		1	1		1						1	1	1	5	fr					
7	Jarb	olire		1		1							1	1	1	4	fr					
8	JavBat	olire		1		1							1	1	1	4	fr					
9	JavTegh	olire													1	1	file	fr	tk	bs	dk	kes
10	JavTnor	olire													1	1	file	fr	tk	bs	dk	kes
11	KlinatanBat	olire													1	1	file	fr	tk	bs	dk	kes
12	KlinatanSdan	olire													1	1	file	fr	tk	bs	dk	kes
13	KlinatanTegh	olire		1		1							1	1	1	5	fr					
14	KlinatanTnor	olire													1	1	0	ifr				
15	KpalaanBngkBlitug	olire		1		1							1	1	1	4	fr					
16	KpalaanRau	olire	1		1								1	1	4	file	fr	tk	bs	dk	kes	
17	Lanpug	olire											1	1	2	file	fr	tk	bs	dk	kes	
18	Mllu	olire													1	1	0	ifr				
19	Mllutha	oflire																0	ste			
20	NgggAclDuslan	olire													1	1	0	ifr				
21	NsTeggaBat	olire		1	1	1									1	4	fr					
22	NsTeggaTnor	olire											1	1	2	0	ifr					
23	Papa	olire													1	1	0	ifr				
24	PapaBat	olire																0	ifr			
25	Rau	olire						1					1	1	3	fr	tbl	as				
26	SlavesBat	olire											1	1	2	file	fr	tk	bs	dk	kes	
27	SlavesSdan	olire													1	1	0	ifr				
28	SlavesTegh	olire											1	1	2	file	fr	tk	bs	dk	kes	
29	SlavesTegga	olire													1	1	0	ifr				
30	SlavesUtha	olire											1	1	2	0	ifr					
31	SrntadBat	olire											1	1	2	0	ifr					
32	SrntadSdan	oflire																0	ste			
33	SrntadUtha	olire											1	1	1	0	ifr					

LAMPIRAN 2

No	NMICA	Sats	RUMAHSANTIA										Jl			
			Cotet		Trio		Techo		Lsa		Support					
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J				
	Setspa-15	QIB														
1	Dapaa	olire											1	1	roifr	
2	Saag	olire											1	1	roifr	
3	Brglu	olire											1	1	roifr	
4	Ygkta	olire		1		1							1	1	4ifr	
5	Jata	olire	1	1	1	1					1	1	1	1	7ifr	
6	Gotlo	olire											1	1	2roifr	
7	Jatb	olire											1	1	roifr	
8	Brdng	olire		1		1							1	1	4ifr	
9	Sraag	olire											1	1	2fileifrdtkisadkes	
10	Sulaa	olire		1		1							1	1	1	5ifr
11	Rotiak	olire											1	1	2roifr	
12	Bajarain	olire											1	1	fileifrdtkisadkes	
13	Pangkaya	olire													0susero	
14	Snairca	olire											1	1	roifr	
15	PangkFrang	olire													0Blunadvsite	
16	TanjungFrang	olire													0Blunadvsite	
17	Brdharpng	olire											1	1	roifr	
18	Aton	olire		1		1	1						1	1	5ifr	
19	Sffi	olire													0Blunadvsite	
20	BrdAch	olire		1	1	1							1	1	5ifr	
21	Maan	olire											1	1	2fileifrdtkisadkes	
22	Krag	olire											1	1	roifr	
23	Jayua	olire											1	1	roifr	
24	Nalvai	olire													0Blunadvsite	
25	Raktau	olire													0susero	
26	Nhju	olire											1	1	roifr	
27	Mkar	olire													0susero	
28	Pau	olire											1	1	2fileifrdtkisadkes	
29	Krdi	olire		1		1							1	1	4ifr	
30	Mab	olire											1	1	roifr	
31	Pdng	olire											1	1	2roifr	
32	Pdrng	olire											1	1	roifr	
33	Nan	olire											1	1	roifr	

LAMPIRAN 3

3^a (Ranks)

	KELOMPOK_ PEMERINTAH	N	Mean Rank	Sum of Ranks
CONTENT	0	30	29.13	874.00
	1	26	27.77	722.00
	Total	56		
TIMELINESS	0	30	28.75	862.50
	1	26	28.21	733.50
	Total	56		
TECHNOLOGY	0	30	28.50	855.00
	1	26	28.50	741.00
	Total	56		
USER_SUPPORT	0	30	28.22	846.50
	1	26	28.83	749.50
	Total	56		

3^b Test Statistics^a

	CONTENT	TIMELINESS	TECHNOLOGY	USER_SUPPORT
Mann-Whitney U	371.000	382.500	390.000	381.500
Wilcoxon W	722.000	733.500	741.000	846.500
Z	-.393	-.157	.000	-.155
Asymp. Sig. (2-tailed)	.694	.875	1.000	.877

a. Grouping Variable: KELOMPOK_PEMERINTAH